

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.
2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kendala yang masih dihadapi oleh TPID Kabupaten Dompu dalam melaksanakan strategi pengendalian inflasi 4K pada periode pelaporan Triwulan I (Januari-Maret) tahun 2024 ini, antara lain:

- a. Panen raya dimulai pada Akhir Maret, sehingga dari Januari hingga Maret relatif tidak ada produksi gabah dan beras. Hal tersebut cenderung berakibat naiknya harga beras di pasaran
 - b. Cabai dan tomat juga tidak berproduksi karena lahan-lahan produktif ditanami padi dan jagung, sehingga secara bertahap terjadi peningkatan harga di pasaran.
 - c. Kabupaten Dompu adalah lumbung pangan untuk komoditi jagung dan gabah, sehingga kebutuhan bahan pokok lainnya umumnya mendapat pasokan dari wilayah lain. Pada saat yang sama, terjadi El Niño, dimana curah hujan dan angin lebih tinggi dari biasanya. Hal tersebut, turut serta mengganggu distribusi pasokan dari luar, seperti gangguan penyebrangan termasuk banjir dan longsor di jalur distribusi.
 - d. Bulan Maret adalah bulan menjelang Ramadhan. Kebiasaan masyarakat, cenderung lebih konsumtif sebagai persiapan menjalani bulan Ramadhan. Hal tersebut turut serta memicu kenaikan harga bahan pokok dan barang penting di pasaran.
 - e. Kelangkaan dan kenaikan harga gas LPG 3 Kg akibat gangguan distribusi pada Hari Besar Keagamaan Nasional.
 - f. Penjualan bahan bakar minyak subsidi di Kabupaten Dompu juga dilakukan oleh pihak yang belum memenuhi Perizinan dan diluar struktur pendistribusian (Pengecer). Banyak ditemukan di penyalur SPBU yang melayani jerigen para pengecer yang menghalangi kendaraan untuk mengakses BBM. Hal tersebut juga mempercepat kehabisan pasokan, dimana para nelayan dan petani yang membutuhkan BBM justru tidak mendapatkan BBM karena telah habis. Kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi tentu akan menyebabkan biaya tinggi disektor produksi, dan tentu saja akan sulit bagi nelayan dan petani untuk memperoleh pendapatan yang layak.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
 - a. Secara internal, segera dilakukan koordinasi lintas sektor bersama-sama dengan BULOG untuk mengoptimalkan toko pangan dan SPHP untuk menjual beras medium sesuai
 - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan memantau pelaksanaan HET oleh kios-kios pangan dan SPHP di pasaran serta dilakukannya Gerakan Pangan Murah dan operasi Pasar. Menyusun regulasi Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan pengawasan Distribusi Gabah serta berkoordinasi dengan kepala Badan Pangan Nasional terkait regulasi penyesuaian HPP sehingga Bulog dapat melakukan Penyerapan Gabah.
 - c. Wakil Bupati Dompu memimpin Rapat Koordinasi TPID Menghadapai Kenaikan Harga Beras yang merupakan bentuk koordinasi para pihak untuk memetakan pemicu permasalahan kenaikan harga Beras. Beberapa hal pemicu permasalahan kenaikan harga beras antara lain :
 - Karena harga gabah naik. Dimana di Kabupaten Dompu di perkirakan 2.893 Ha

mengalami gagal panen akibat elnino, Kabupaten Sumbawa Barat juga mengalami gagal panen akibat elnino dan banjir, dan sebagian hamparan padi Kabupaten Sumbawa juga mengalami gagal panen akibat banjir, serta harga gabah di pulau lombok diatas Rp. 8.000,-/Kg; hal tersebut menyebabkan hasil panen di Kabupaten Dompu menjadi rebutan.

- Petani tidak memiliki stock, gabah hasil produksi dijual seluruhnya. Pembeli utama gabah di Kabupaten Dompu berasal dari penggilingan di Kabupaten Sumbawa, dan beras yang beredar di Kabupaten Dompu kebanyakn berasal dari kabupaten Sumbawa. Dengan demikian, harga beras sudah termasuk biaya transport, biaya produksi, pajak, keuntungan perusahaan dan lain-lain.

Rencana penanganan jangka pendek :

- Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar (OP) di Bulan Maret 2024
- Bansos Pangan akan dilaksanakan 1 minggu sebelum Ramadhan, untuk target 27 ribu KPM @10 kg à total 270 ton beras
- Dinas Perhubungan agar melakukan penertiban kendaraan angkut yang membawa hasil bumi (beras) keluar Kabupaten Dompu, agar tidak over dimensi dan over load

Rencana penanganan jangka menengah :

- Puncak panen diperkirakan berlangsung pada Bulan April 2024 seluas 6.214 hektar. Bila harga gabah tetap diatas 6.000/kg saat puncak panen, maka dipastikan Bulog tidak dapat melakukan penyerapan gabah petani. Kondisi tersebut dikuatirkan akan memunculkan masalah baru dilapangan. Untuk mengatasi kemungkinan yang tidak diharapkan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dompu akan bersurat kepada Badan Pangan Nasional untuk meminta penyesuaian HPP atau kebijakan lainnya, sehingga Bulog dapat melakukan penyerapan gabah saat panen raya
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu juga akan membuat regulasi Peraturan Bupati Dompu tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Gabah, sebagai alat kendali distribusi gabah keluar daerah (antar kabupaten/kota), sekaligus untuk menjaga ketersediaan pasokan bagi RMU dan penggilingan lokal (menjaga hilirisasi produk pangan), serta untuk menjaga ketahanan pangan, keterjangkauan dan stabilisasi harga pangan (beras) dalam daerah

d. Melaksanakan Operasi Pasar (OP) di Bulan Maret 2024 sebanyak 2 kali sebagai pelaksanaan hasil Rakor TPID tanggal 1 Maret 2024 yaitu:

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan Operasi Pasar Menjelang Hari Besar Keagamaan (HBKN) pada tanggal 21 Maret 2024 di Lapangan Karijawa Kecamatan Dompu dengan komoditas beras 2 ton, minyak goreng 1.000 Liter, gula pasir 1.000 Kg, dan telur 15.000 Butir
- Operasi Pasar pada tanggal 28 Maret 2024 di Polsek Hu'u Kecamatan Hu'u dengan komoditas beras 2 ton, dan minyak goreng 500 Liter

e. Gerakan Pangan Murah akan dilaksanakan sebanyak 1 kali pada Triwulan I sebagai pelaksanaan hasil Rakor TPID tanggal 1 Maret 2024 yaitu pada Tanggal 6 Maret 2024 sesuai

surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nomor 521/99/DKP/III/2024, dimana Gerakan pangan Murah dilaksanakan dengan komoditas beras 7.000 Kg, minyak goreng Riski 700 liter, gula pasir 500 Kg, telur ayam ras 950 Kg, minyak goreng Bimoli 300 liter, tepung terigu 100 Kg, bawang merah 100 Kg, cabai rawit merah 50 Kg, ikan segar 50 Kg, dan sayur-sayuran 100 Kg

f. Sebagai tindak lanjut Rakor TPID tanggal 1 Maret 2024, Bansos pangan untuk triwulan I telah dilaksanakan dengan jumlah 402 ton beras dengan jumlah penerima 40.200 KK (10 Kg/KK)

g. Sebagai tindak lanjut Rakor TPID tanggal 1 Maret 2024, Sekretaris Daerah menerbitkan surat Nomor 500/57/EKONSDA/2024 Tanggal 5 Maret 2024 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, guna mengendalikan pengeluaran hasil panen (gabah) keluar daerah dengan masif, Dinas Perhubungan diminta untuk melakukan penertiban kendaraan angkut yang membawa hasil bumi (gabah) keluar/masuk Kabupaten Dompu, agar tidak ODOL (Over Dimensi Over Load), agar tidak berdampak pada:

- Kerusakan infrastruktu jalan, jembatan, dan pelabuhan
- Kebutuhan biaya pemeliharaan infrastruktur meningkat
- Menurunnya tingkat keselamatan lalu lintas jalan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

h. Sebagai tindak lanjut Rakor TPID tanggal 1 Maret 2024, Sekretaris Daerah menerbitkan surat Nomor 500/58/EKONSDA/2024 Tanggal 5 Maret 2024 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu, agar :

- segera membuat regulasi Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan pengawasan Distribusi Gabah, yang merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Gabah.
- segera bersurat dan berkoordinasi dengan Kepala Badan Pangan Nasional untuk meminta penyesuaian HPP atau kebijakan lainnya, sehingga Bulog dapat melakukan penyerapan gabah saat panen raya 2024 ini.
- Dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, agar terlebih dahulu dilakukan pemetaan sasaran, dan dalam pelaksanaanya agar memperhatikan penyebaran kegiatan sehingga dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok

i. Untuk menjaga pemerataan layanan (akses) BBM di seluruh wilayah kecamatan, maka dengan surat Bupati Nomor 500.10.10.1/34/EKONSDA/2024 tanggal 16 Februari 2024 diusulkan lokasi tertentu pembangunan penyalur BBM satu harga melalui Pemprov NTB.

j. Sebagai sebagai antisipasi potensi kelangkaan gas LPG 3 Kg di hari-hari tanpa penyaluran akibat libur, Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu bersurat kepada Pimpinan PT. Pertamina NTB dengan Nomor 500/73/EKONSDA/2024 tanggal 19 Maret 2024.

k. Sebagai bentuk koordinasi antar jenjang TPID, Sekretaris Daerah menghadiri Rakor TPID Tingkat Provinsi yang dilaksanakan tanggal 12 Januari 2024 sesuai surat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB Nomor 500/005/Ekon-I/2024 tanggal 10 Januari 2024

l. Untuk peningkatan kualitas laporan TPID, Sekretariat TPID mengikuti capacity building penulisan laporan yang diadakan oleh Perwakilan Bank Indonesia NTB yang dilaksanakan dari tanggal 12-13 Februari 2024.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kejadian yang terus berulang setiap tahunnya yaitu menghadapi puasa, lebaran dan menghadapi harga komoditi utama saat panen raya. Sebagai bentuk evaluasi, terdapat beberapa kebijakan yang perlu :

- a. Bahwa Kabupaten Dompu belum memiliki regulasi yang dapat menjadi kendali distribusi gabah keluar daerah (dari Kabupaten Dompu ke antar kabupaten/kota). Sesuai hasil rapat, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Dompu diminta segera membuat regulasi Peraturan Bupati Dompu tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Gabah, yang merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Regulasi tersebut menjadi penting karena selain menjaga gabah petani tidak keluar daerah seluruhnya, sekaligus untuk menjaga ketersediaan pasokan bagi RMU dan penggilingan lokal (menjaga hilirisasi produk pangan), serta untuk menjaga ketahanan pangan, keterjangkauan dan stabilisasi harga pangan (beras) dalam daerah
- b. Dinas Ketahanan Pangan diminta segera membuat regulasi Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan pengawasan Distribusi Gabah, yang merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Gabah. Peraturan Bupati tersebut diperlukan sebagai alat kendali distribusi gabah keluar daerah (dari Kabupaten Dompu ke anatar kanupaten/kota), sekaligus untuk menjaga ketersediaan pasokan bagi RMU dan penggilingan lokal (menjaga hilirisasi produk pangan), serta untuk menjaga ketahanan pangan, keterjangkauan harga, dan stabilisasi harga panagn (beras) dalam daerah
- c. Alokasi gas subsidi selalu kurang dari kebutuhan. Dan pembagian alokasi bulanan juga tidak sesuai perilaku dan tingkat kebutuhan, dimana Kabupaten Dompu memiliki pola konsumsi linier dengan aktivitas musim panen dan tanam, dan dengan anomali tertinggi pada saat bulan puasa.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- a. Menyusun regulasi Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan pengawasan Distribusi Gabah serta berkoordinasi dengan kepala Badan Pangan Nasional terkait regulasi penyesuaian HPP sehingga Bulog dapat melakukan Penyerapan Gabah.
- b. Terkait distribusi LPG subsidi, segera dilakukan koordinasi lintas sektor bersama-sama dengan PT. Pertamina untuk menambahkan alokasi fakultatif. Pada tahun 2024 tidak ada penyaluran pada hari-hari libur dan tidak ada alokasi pengganti saat hari non penyaluran tersebut. Perencanaan penyaluran per bulan juga diharapkan mengikuti pola konsumsi masyarakat. Sehingga sebagai dasar penggunaan cadangan LPG Subsidi ataupun pergeseran dari tempat lain, Pemerintah Kabupaten Dompu harus mengajukan penambahan alokasi bila dibutuhkan ke Pertamina. Untuk hal tersebut, maka pemantauan dan monev ketersediaan dan harga LPG 3 Kg di pasar harus dilakukan setiap hari.
- c. Mengaktifkan penggilingan lokal/lumbung pangan
- d. Perbaiki sarana dan prasaran pertanian guna peningkatan hasil produksi pertanian terutama gabah
- e. Perlunya program atau kegiatan pendukung yang dapat menjaga ketersediaan pasokan terutama di holtikultural seperti cabe dan tomat, diantaranya dengan merencanakan penanaman dengan

- Perlunya ketersediaan cool storage untuk daging dan ikan juga sayuran. Selain sebagai untuk penyimpanan juga untuk mengantisipasi permintaan disaat produksi terbatas atau sebagai cadangan pangan. Pengelola cool storage juga dapat berfungsi sebagai off taker.
- g. Seluruh kabupaten/kota lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat agar pasarnya diintegrasikan dalam suatu sistem informasi yang memungkinkan kerjasama antar daerah dengan memperhatikan neraca di masing-masing pasar. Pergerakan distribusi silang dengan memperhatikan kondisi neraca dan ketahanan di masing- masing kabupaten/kota, akan menjaga pasar tetap dengan harga terjangkau dan stabil.